BAB VI: KESIMPULAN DAN SASARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Penyakit Hipertensi di Puskesmas Air Dingin, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Unsur *Input*

1. Permenkes RI Nomor 4 merupakan kebijakan yang dijadikan pedoman dalam SPM Hipertensi dan puskesmas namun belum semua petugas mengetahui terkait kebijakan serta indikator dalam pelaksanaan SPM Hipertensi. Kebijakan sudah disosialisasikan oleh dinas kesehatan maupun puskesmas ketika kebijakan dikeluarkan namun sosialisasi ulang terkait kebijakan belum pernah dilakukan.
2. Pelaksana SPM Hipertensi dipegang oleh satu pemegang program dan melibatkan dokter, bidan, dan perawat. Puskesmas Air Dingin belum memenuhi standar tenaga dalam pelaksanaan SPM Hipertensi berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 karena belum melibatkan tenaga kesehatan masyarakat. Kecukupan tenaga dalam pelaksanaan SPM dinilai masih kurang dan ditemukanya beban kerja ganda pada petugas kesehatan.
3. Sumber dana pelaksanaan SPM bersumber dari dana APBD, BOK, dan BLUD Puskesmas. Dana dalam pelaksanaan SPM Hipertensi dinilai masih kurang yang menyebabkan beberapa program tidak memiliki pendanaan khusus sehingga pendanaanya diintegrasikan dengan program lain yang pelaksanaannya sejalan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

4. Sarana dan prasarana di Puskesmas Air Dingin sudah tersedia namun belum mencukupi sesuai dengan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 karena belum tersedianya Kit PTM. Selain itu, Puskesmas belum memiliki ruangan khusus dalam pelaksanaan SPM Hipertensi.

Unsur *Process*

1. Pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan di puskesmas maupun di Posbindu PTM namun pemantauan hanya dilakukan di puskesmas. Petugas menghubungi pasien dan melakukan kunjungan rumah dalam upaya pemantauan namun belum semua pasien dihubungi oleh petugas. Posbindu PTM belum dilakukan secara rutin satu kali dalam sebulan dan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTM masih rendah. Pemantauan pasien belum terlaksana secara maksimal disebabkan oleh beban ganda pada petugas, rendahnya komitmen petugas dalam melakukan pemantauan pasien dan belum tersedianya dana dalam pelaksanaan pemantauan.
2. Edukasi dilakukan ketika pasien berobat ke puskesmas namun belum semua pasien diberikan edukasi ketika berobat ke puskesmas. Penyuluhan luar gedung belum maksimal dilakukan oleh petugas. Selain itu, belum ada penerapan media edukasi ke pasien hipertensi.
3. Terapi farmakologi sudah diberikan oleh Puskesmas Air Dingin sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 yang mana terapi farmakologi sudah dilakukan oleh dokter dan diberikan kepada pasien dengan tekanan darah diatas 140 mmHg namun masih banyak pasien tidak mendapatkan terapi farmakologi karena tidak melakukan kontrol rutin ke puskesmas disebabkan oleh kepatuhan pasien dalam kontrol rutin masih rendah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Unsur *Output*

Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi di Puskesmas Air Dingin belum mencapai target 100 %. Kendala utama yang menjadi hambatan dalam pencapaian SPM hipertensi yaitu belum maksimalnya pemantauan yang dilakukan oleh petugas. Hal ini terjadi karena beban kerja ganda pada petugas sehingga petugas belum optimal dalam melakukan pemantauan namun disamping hal tersebut komitmen petugas dalam melakukan pemantauan pasien juga masih rendah dalam sehingga pemantauan pada pasien ketersampingkan. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan pemantauan pasien disebabkan belum tersedianya dana dalam pelaksanaan pemantauan sehingga petugas mengalami kesulitan dalam upaya pemantauan pasien.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Mensosialisasikan kembali terkait kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Hipertensi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 agar semua petugas kesehatan mengetahui terkait kebijakan yang berlaku.
2. Dinas Kesehatan perlu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian petugas maupun kader terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi.
3. Dinas Kesehatan perlu memberikan arahan ke puskesmas untuk melakukan perencanaan SDM agar tidak terjadi rangkap jabatan atau beban kerja ganda yang memberatkan kinerja petugas.

4. Dinas Kesehatan sebaiknya terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan SPM Hipertensi agar pelaksanaan SPM Hipertensi berjalan dengan baik dan lebih optimal dalam pencapaian target.

6.2.2 Bagi Puskesmas Air Dingin

1. Puskesmas sebaiknya membuat buku saku yang berisikan penjelasan dalam pelaksanaan SPM Hipertensi dan diberikan ke seluruh petugas puskesmas untuk meningkatkan pemahaman petugas terkait dengan pelaksanaan SPM Hipertensi.
2. Puskesmas harus melakukan analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja agar tidak terjadi rangkap jabatan atau beban ganda yang dapat memberatkan kinerja petugas. Puskesmas Air Dingin perlu mengusulkan penambahan tenaga kesehatan seperti tenaga kesehatan masyarakat ke Dinas Kesehatan Kota Padang agar Standar Tenaga dalam pelaksanaan SPM hipertensi terpenuhi sesuai dengan Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019.
3. Puskesmas Air Dingin perlu mengusulkan terkait pengadaan Kit PTM ke Dinas Kesehatan untuk mencukupi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPM Hipertensi.
4. Puskesmas Air Dingin sebaiknya mengalokasi dana operasional dalam pemantauan pasien hipertensi agar pemantauan pasien hipertensi dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat menjangkau seluruh pasien hipertensi yang ada di Puskesmas Air Dingin.
5. Puskesmas diharapkan dapat terus memantau pelaksanaan Posbindu PTM agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat dapat dilakukan secara rutin setiap bulan. Puskesmas sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi peran kader

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

dalam pelaksanaan Posbindu PTM serta melatih kader agar mampu mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke Posbindu PTM sehingga kunjungan masyarakat dapat meningkat.

6. Puskesmas Air Dingin sebaiknya lebih mengoptimalkan edukasi ke pasien hipertensi terkait dengan kontrol rutin, perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat. Puskesmas juga diharapkan mampu mengembangkan media edukasi yang menarik dan diterapkan ke pasien hipertensi ketika pasien datang ke puskesmas maupun ketika petugas melakukan penyuluhan luar gedung sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan pasien terkait hipertensi.
7. Puskesmas diharapkan mampu menumbuhkan komitmen pada petugas dalam melakukan pemantauan pasien hipertensi dengan cara meningkatkan kemampuan petugas melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan terkait dengan pelayanan hipertensi sesuai standar.
8. Petugas yang terlibat dalam pemantauan pasien hipertensi diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan saling berkoordinasi dalam pemantauan pasien hipertensi.
9. Puskesmas juga diharapkan dapat terus mengoptimalkan lagi pelaksanaan pemantauan pasien via telekomunikasi agar pasien dapat terus diingatkan untuk mengukur tekanan darah ke puskesmas setiap bulan.
10. Puskesmas sebaiknya juga melibatkan kader dalam melakukan pemantauan pasien hipertensi dengan memberikan data berupa nama dan alamat penderita hipertensi pada kader dan meningkatkan kompetensi kader dalam upaya pemantauan pasien hipertensi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

6.2.3 Bagi Pasien Hipertensi

1. Pasien diharapkan untuk patuh dalam melakukan kontrol rutin ke puskesmas minimal satu kali dalam sebulan sehingga petugas dapat terus melakukan pemantauan tekanan darah dan dapat mencegah terjadinya komplikasi penyakit.
2. Pasien diharapkan patuh dalam mengkonsumsi obat-obatan hipertensi sebagai upaya penanganan hipertensi agar pengobatan berjalan efektif yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah terjadinya komplikasi.

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi dan Diabetes Melitus yang memiliki capaian rendah. Karena puskesmas seringkali menggabungkan pembahasan Diabetes dan Hipertensi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA